

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah sebagai suatu lembaga dalam pelaksanaan ketatanegaraan tentu memiliki fungsi dan tugas-tugas yang diantaranya memberikan pelayanan publik bagi masyarakat, dari mulai Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Desa. Sebagai pelayan publik, pemerintah selalu berupaya menciptakan dan mengembangkan kebijakan-kebijakan terkait pelayanan publik guna terciptanya pelayanan publik yang prima. Upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima salah satunya dengan menerapkan kebijakan *Electronic Government* disingkat *E-Government* atau dalam Bahasa Indonesia disebut Pemerintahan Elektronik sebagai pencapaian sistem pemerintahan berbasis elektronik dari kemajuan teknologi dan informasi.

Tujuan implementasi *E-Government* salahsatunya adalah agar lembaga pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam kaitan ini dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk merintis hal yang baru dalam birokrasi. Pemanfaatan *E-Government* bagi birokrasi diharapkan dapat menjadi alternatif bagi reformasi birokrasi menuju pelayanan yang lebih baik.

*E-Government* di Indonesia telah diperkenalkan sejak tahun 2001 melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi,

Media, dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Kemudian keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Kedua Instruksi Presiden tersebut merupakan langkah serius Pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan dan menciptakan pemerintahan Indonesia berbasis teknologi informasi.

Salah satu instansi pemerintah yang mulai menerapkan konsep *E-Government* yaitu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang salah satu upayanya adalah dengan menciptakan situs web pada dinas-dinas dalam ranah pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang dikelola dan di bawah tanggung jawab Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat dengan landasan hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, serta Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengembangan Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan salah satu staf Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kabupaten Bandung Barat yaitu Pak Timmy Sampoerna Irawan sebagai Kepala Seksi Manajemen Data dan Pengembangan Aplikasi, beliau menjelaskan latar belakang diciptakannya situs web Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat karena adanya aturan bahwa setiap

daerah wajib menginformasikan profil dan kegiatan pemerintahan melalui *website* seperti kegiatan pelayanan publik sebagai salah satu upaya pengembangan proses pemerintahan. Beliau juga menyebutkan bahwa untuk jumlah *website* dalam Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang terkait profil perangkat daerah seharusnya berjumlah total 47, namun dari jumlah 47 *website* tersebut tidak semua berjalan dengan baik, ada sebagian yang aktif dan sebagian lagi tidak aktif, sehingga *website* yang tidak aktif tersebut akan secara otomatis terhapus dan tidak bisa terakses. Beberapa *website* Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat yang masih aktif diantaranya *website* resmi Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, *website* Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bandung Barat, *website* Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bandung Barat, *website* Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, *website* Dinas Kesehatan Bandung Barat, *website* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Barat, *website* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Barat, dan *website* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat.

Namun, dari sekian banyak *website-website* yang dimiliki Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat tersebut, dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil salahsatu *website* saja sebagai bahan penelitian, yaitu *website* resmi Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dengan alamat web [www.bandungbaratkab.go.id](http://www.bandungbaratkab.go.id). Mengapa peneliti hanya meneliti satu web saja sementara terdapat delapan *website* lain pada Perangkat Daerah Kabupaten

Bandung Barat? Karena *website* resmi Kabupaten Bandung Barat merupakan *website* utama untuk masyarakat yang dimana segala sesuatu informasi mengenai Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat tersedia dalam *website* tersebut termasuk informasi-informasi terkait Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung Barat, misalnya seorang masyarakat ingin mencari informasi mengenai Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kabupaten Bandung Barat, masyarakat tersebut bisa mengunjungi *website* Resmi Kabupaten Bandung Barat terlebih dahulu dan mencari daftar Perangkat Daerah serta informasi-informasi lainnya, sementara *website* lainnya hanya menyajikan informasi terkait Perangkat Daerah yang bersangkutan saja, itulah mengapa peneliti hanya mengambil studi kasus satu situs web resmi Kabupaten Bandung Barat untuk dijadikan bahan penelitian.

Peneliti mengambil lokus penelitian di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat karena saat ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam kepemimpinan Aa Umbara dan Hengky Kurniawan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahannya termasuk dalam implementasi *E-Government* penggunaan situs web resmi Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang dimana perlu diteliti mengenai keberhasilan implementasi *E-Government* tersebut mengingat Kabupaten Bandung Barat masih terbilang Kabupaten baru hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Bandung.

Situs web Resmi Kabupaten Bandung Barat termasuk kepada jenis *E-Government G2C (Government to Citizen)* yaitu Pemerintah ke masyarakat yang dimana masyarakat bisa mengakses web tersebut dan melihat informasi-informasi terkini tentang Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, sehingga masyarakat

bisa dengan mudah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah serta mudah mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Berikut merupakan tampilan utama situs web resmi Kabupaten Bandung Barat.



**Gambar 1.1 Tampilan Situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat**

Gambar tersebut menunjukkan bahwa situs web resmi Kabupaten Bandung Barat menyajikan beberapa fitur yang terkait dengan seluruh informasi Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, yang diantaranya informasi tentang Bandung Barat, pelayanan publik, pengaduan masyarakat, aplikasi pemerintahan, dokumen perencanaan, transparansi pengelolaan anggaran dan lain sebagainya.

Hasil wawancara dengan salah satu staf Diskominfo Kabupaten Bandung Barat yang sudah disebutkan sebelumnya serta dari hasil analisa peneliti sebagai pengunjung *website* Resmi Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2017, peneliti menemukan beberapa kendala dari implementasi *website* resmi Kabupaten Bandung Barat ini diantaranya web tersebut belum dapat terakses dengan

sempurna yang dimana terdapat beberapa fitur yang tidak dapat diakses, berita-berita atau informasi-informasi dari Perangkat Daerah masih kurang *ter-update*, belum tersedia penambahan fitur-fitur yang lebih interaktif, sumber daya manusia yang dikerahkan masih banyak yang tidak sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan, serta masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengunjungi *website* ini yang dimana banyak masyarakat Kabupaten .Bandung Barat bahkan tidak mengetahui akan adanya implementasi situs web resmi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi *E-Government* pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, dengan judul penelitian **“Implementasi *E-Government* pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Studi Kasus Implementasi Situs Web Resmi Kabupaten Bandung Barat)”**



## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Implementasi *E-Government* yang belum berjalan secara optimal di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2. Faktor-faktor penghambat keberhasilan implementasi *E-Government* di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

3. Banyaknya kendala-kendala dalam pelaksanaan implementasi *E-Government* di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, serta banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya pemerintahan elektronik/ *E-Government* di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

### C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan *E-Government* pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat keberhasilan implementasi *E-Government* pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat?
3. Solusi-solusi apa saja yang bisa menjadi upaya penyelesaian hambatan-hambatan dari implementasi *E-Government* pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat?

### D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu diantaranya

1. Untuk mengetahui implementasi *E-Government* pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan implementasi *E-Government* pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

3. Untuk mengetahui solusi-solusi yang bisa menjadi upaya penyelesaian hambatan-hambatan dari implementasi *E-Government* pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Teoretis**

Secara teoretis kegunaan penelitian ini diantaranya:

- a. Penelitian ini diharapkan berguna dalam proses penerapapan ilmu atau teori yang sudah didapatkan oleh peneliti selama masa perkuliahan serta dapat memberikan manfaat sumbangan berupa pemikiran bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik khususnya dalam kaitannya dengan konsentrasi Kebijakan Publik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

### **2. Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai alternatif pemecahan masalah-masalah dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik.



b. Bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam memberikan solusi-solusi untuk upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi implementasi *e-Government* dan hasilnya dapat menguntungkan masyarakat dan pemerintah.

**F. Kerangka Pemikiran**

Pembahasan skripsi ini mengenai Implementasi *E-Government* pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang dimana dalam proses pembahasan dan pemecahan masalah terkait hal yang diteliti tersebut memerlukan landasan-landasan teori yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti, sehingga penelitian bisa dilaksanakan.

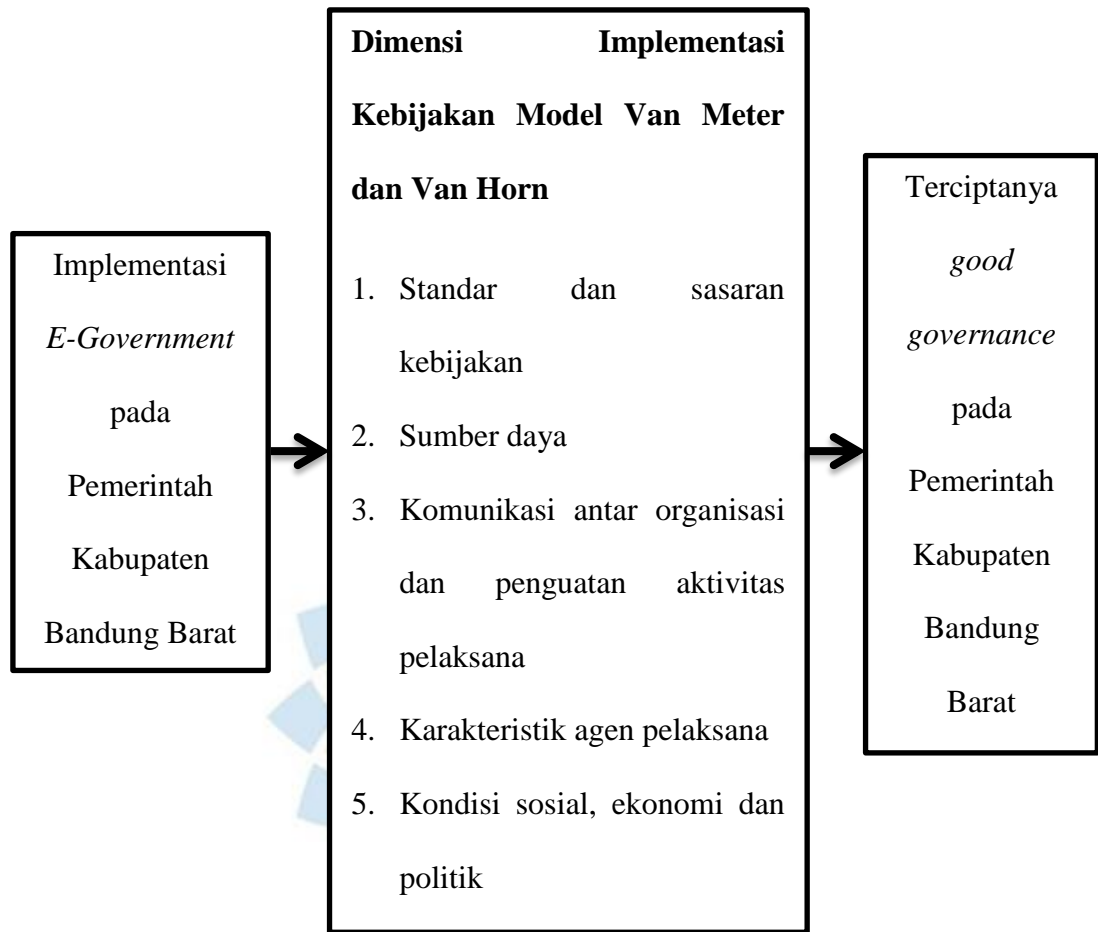
Implementasi *E-Government* pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat termasuk pada kajian implementasi kebijakan publik yang merupakan implementasi dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Barat yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengembangan Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Implementasi kebijakan merupakan inti dari keberhasilan suatu kebijakan publik. Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Syafri & Setyoko (2010:16) diartikan sebagai “tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan”.

Proses pencapaian keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan sering sekali dihindangi kendala-kendala yang menjadi penghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk mengukur keberhasilan implementasi *E-Government* pada pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016: 72) yang menyatakan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas pelaksana
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
6. Disposisi implementor





**Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran**

Implementasi *E-Government* di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kabupaten Bandung Barat masih banyak terdapat kendala-kendala dalam proses implementasinya, terutama berkaitan dengan Dimensi Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Van Horn yaitu Dimensi Standar dan Sasaran Kebijakan dimana sasaran kebijakan tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengembangan Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 3 poin C yang berbunyi “terlaksananya

peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal” namun dilihat dari implementasi situs web masih belum optimal yaitu beberapa fitur pelayanan publik belum bisa diakses dengan sempurna dan terkadang error, berita-berita atau informasi-informasi dari Perangkat Daerah masih kurang ter-*update*, belum tersedia penambahan fitur-fitur yang lebih interaktif, lalu Pasal 3 poin E yang berbunyi “terwujudnya masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi” masih belum terwujud dimana masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengunjungi web tersebut dan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui situs web Kabupaten Bandung Barat tersebut. Selanjutnya dalam Dimensi Sumber Daya berkaitan dengan Sumber Daya Manusia yang tercantum pada Pasal 19 poin 3 yang berbunyi “setiap perangkat daerah wajib menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik” namun yang terjadi di lapangan sumber daya manusia yang dikerahkan masih banyak yang tidak sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.

### **G. Proposisi**

Proposisi merupakan suatu dugaan yang bersifat sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena masalah yang terjadi. Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dan kerangka pemikiran, penulis merumuskan

proposisi penelitian sebagai berikut: Implementasi *e-Government* pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat akan berjalan efektif dan efisien apabila sesuai dengan enam dimensi implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
6. Disposisi implementor

